

► TAWARKAN SAHAM IPO

# BRI Syariah Jaring Investor

JAKARTA — PT Bank BRI Syariah Tbk. mengadakan *road show* dan menggelar temu investor atau *investor gathering* dengan para nasabah prioritas BRI dan BRI Syariah untuk menawarkan saham perdana.

Rangkaian temu calon investor tersebut diselenggarakan di 9 kota yakni Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Medan, pada 5—19 April 2018.

Dalam *roadshow* di Jakarta, Rabu (18/4), Direktur BRI Syariah Wildan menyatakan pihaknya mengundang seluruh masyarakat untuk bergabung menjadi keluarga besar BRI Syariah dengan memiliki saham perseroan.

“Sebagai keluarga besar kita akan dapat berjalan bersama menuju terciptanya ekonomi yang sehat dengan prinsip syariah yang mengedepankan kepercayaan, keadilan, menghormati sesama, kebenaran, dan toleransi, melalui penerapan *ethical financing*,” kata Wildan dalam acara Temu Calon Investor di Jakarta.

Dia menjelaskan, dengan sinergi dan dukungan perusahaan induk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., BRI Syariah akan senantiasa menjaga amanah untuk membawa berkah bagi seluruh masyarakat.

Sejumlah tokoh pemerintah dan perbankan turut hadir di acara temu calon investor di Jakarta.

Adapun, acara yang digelar di kota-kota lainnya juga diikuti perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Corporate Secretary BRI Syariah Indriati Ti Handayani menuturkan dari hasil rangkaian acara *roadshow* menemui calon investor, pihaknya optimistis bahwa seluruh saham yang ditawarkan akan teresap.

Dia menuturkan, antusiasme calon investor selama *roadshow* cukup tinggi, yang tampak dari jumlah pemesanan saham melalui *Joint Lead Underwriters Initial Public Offering* (IPO) BRI Syariah yakni Bahana Sekuritas, CLSA Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan IndoPremier Sekuritas.

“Kami tetap optimistis dan berharap permintaan pembelian saham BRI Syariah sesuai target,” kata Indriati, Kamis (19/4).

## INVESTOR RITEL

Adapun, masa penawaran umum untuk calon investor BRI Syariah akan diadakan di lapangan olahraga Gedung BRI Jakarta, tepatnya di Kawasan Sudirman, pada tanggal 2, 3, dan 4 Mei 2018.

“Penawaran umum ini juga akan dihadiri oleh Ustadz Yusuf Mansur. Masa penawaran ini merupakan kesempatan bagi investor ritel untuk turut serta membeli saham BRI Syariah.”

Sebelumnya BRI Syariah telah mengadakan paparan publik dalam rangka penawaran umum

perdana saham atau IPO pada tanggal 5 April 2018, di Gedung BRI I, Jakarta.

Dalam paparan publik terkait rencana IPO, Direktur Utama BRI Syariah Moch. Hadi Santoso menyatakan tujuan IPO BRI Syariah adalah untuk memperoleh tambahan dana dari masyarakat untuk pengembangan bisnis dan memperkuat industri Syariah di tanah air.

Total saham yang ditawarkan BRI Syariah kepada masyarakat dalam IPO adalah maksimal 2,62 miliar lembar saham yang keseluruhannya merupakan saham baru. Adapun harga saham dikisaran Rp505—Rp650.

Dengan nilai tersebut, batas bawah penghimpunan dana hasil IPO berkisar Rp1,32 triliun dan batas atas sekitar Rp1,71 triliun.

Hadi yakin seluruh saham yang ditawarkan akan teresap oleh pasar seluruhnya dengan nilai batas atas sehingga permodalan bank dapat naik ke BUKU III yakni minimal Rp5 triliun dari jumlah saat ini Rp3,6 triliun.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam IPO, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI Syariah akan mengalami perubahan. Porsi saham BRI akan berkurang dari 99,99% menjadi 72,99% dengan nominal Rp3,55 triliun. Adapun, porsi masyarakat sebanyak 27% dengan nominal Rp1,31 triliun. (Ropesta Sitorus)

► STRATEGI BISNIS BANK SYARIAH

# Utak-atik Akad

JAKARTA — Industri perbankan syariah di Indonesia masih sulit bersaing dengan bank konvensional. Padahal, bank-bank tersebut tumbuh dalam ekosistem yang dihuni oleh ratusan juta warga muslim.

Abdul Rahman  
abdul.rahman@bisnis.com

Salah satu kendala bank syariah sulit berkembang di Indonesia adalah sempitnya ruang gerak. Sekalipun banyak peluang bisnis yang bisa digarap, ekspansi bank syariah kerap terbentur oleh belum adanya akad yang dapat mengakomodasi beragam transaksi perbankan.

Secara umum, akad pembiayaan dalam perbankan syariah yang paling sering dipakai ada tiga yaitu *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*. *Murabahah* atau akad jual beli barang biasanya dipakai dalam pembiayaan perumahan (KPR).

*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Akad ini dipakai untuk pembiayaan modal kerja.

Sedangkan *ijarah* adalah akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak. Tujuannya untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Akad ini diaplikasikan dalam penerbitan surat berharga syariah negara atau dikenal sebagai sukuk.

Pada perkembangannya, akad-akad di atas kemudian mengalami

modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Contohnya *mudharabah muqayyadah* atau *musyarakah mutanaqisah*.

Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) Budi Satria mengatakan, sebetulnya jenis-jenis pembiayaan di bank syariah banyak sekali, hanya saja memang belum semuanya bisa dieksekusi karena berbagai kendala.

Sejumlah kendala yang selama ini dihadapi di antaranya adalah kurangnya pemahaman jenis-jenis pembiayaan, pasar yang belum berkembang, serta belum adanya cara mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam jenis pembiayaan syariah.

“Termasuk di dalamnya landasan akad,” katanya kepada *Bisnis*, Kamis (19/4).

PT Bank BNI Syariah adalah salah satu bank syariah yang mengalaminya. Pemimpin Divisi Keuangan BNI Syariah Wahyu Avianto baru-baru ini bercerita bahwa pihaknya melihat peluang bisnis yang besar dalam hal pengalihan penagihan utang.

Perseroan melihat cukup banyak masyarakat yang ingin mengalihkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank konvensional ke bank syariah. Istilah umumnya adalah *take over* kredit. Namun, hal tersebut terkendala oleh tak adanya regulasi untuk peralihan tersebut. Padahal, secara hukum Islam hal tersebut dimungkinkan melalui prinsip *hawalah*.

*Hawalah* dalam bahasa Arab bermakna mengalihkan atau memindahkan. Di dalam istilah ilmu fiqh, *hawalah* berarti pengalihan penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang menanggung utang.

Oleh karena itu, BNI Syariah

lantas mengajukan permohonan izin akad *hawalah*. Wahyu berharap produk berbasis akad *hawalah* sudah bisa diluncurkan paling lambat pada semester I/2018.

Produk ini mengincar segmen konsumen yang ingin beralih dari produk perbankan konvensional ke syariah. Wahyu optimistis produk tersebut akan diminati sebab permintaannya cukup tinggi.

Akad *hawalah* dinilai cocok untuk produk kredit konsumen seperti KPR. Wahyu menjelaskan, indikator pertumbuhan kredit konsumsi di Indonesia cukup positif yang terlihat dari kondisi makro ekonomi. Salah satu buktinya, rasio pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif selalu di bawah pembiayaan produktif.

Selain potensi dari *take over* kredit bank konvensional, BNI Syariah juga membuka peluang *take over* kredit dari sesama bank syariah. Selama ini, pemindahan kredit dari sesama bank syariah belum bisa dilakukan kecuali yang sifatnya investasi.

Adapun, yang sifatnya jual beli tidak bisa karena barang sudah dimiliki oleh nasabah. Untuk mengatasi hal itu diperlukan variasi akad *hawalah*.

## KEBUTUHAN

Presiden Direktur PT Bank BCA Syariah John Kosasih berpendapat senada. Menurutnya, modifikasi akad tidak boleh berhenti dan harus bisa mengikuti dinamika kebutuhan nasabah. Apalagi seiring dengan kehadiran teknologi finansial, akad perbankan syariah harus mampu mengakomodasinya.

“Peluang di perbankan syariah masih terbuka luas dan akad perbankan syariah sudah semakin lengkap. Dari waktu ke waktu mengikuti dinamika berbagai kebutuhan nasabah,” ujarnya.

Namun, dia menilai kodifikasi produk syariah di OJK sudah cukup lengkap dan terus berkembang. Yang dilakukan oleh pihaknya hanyalah melaporkan aktivitas baru dengan kodifikasi akad yang sudah tersedia. [E]

► PROMO PEMBIAYAAN SYARIAH



Bisnis/Dwi Prasetya

Pengunjung mencari informasi di stan Bank Syariah Mandiri pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018 di Jakarta, Kamis (19/4). PT Bank Syariah Mandiri menawarkan kepemilikan kendaraan secara syariah (BSM Oto) dan menyediakan promo menarik pembiayaan mobil baru jenis

passenger dengan jangka waktu 1- 5 tahun dengan berbagai kemudahan. Untuk 200 nasabah pertama yang bertransaksi, perseroan memberikan fasilitas bebas premi asuransi personal accident yang berlaku selama jangka waktu pembiayaan.

► PELATIHAN JAMINAN HALAL

# Sertifikasi Adalah Kunci

Ena Sukarelawanto  
ena.sukarelawanto@bisnis.co.id

Jaminan sertifikasi halal menjadi pintu masuk bagi industri makanan dan minuman, obat-obatan, dan kosmetika, untuk dapat menguasai pasar masyarakat muslim. Tak main-main, semakin banyak perusahaan dari berbagai negara belajar ke Indonesia untuk mengetahui lebih jauh prasyarat yang harus dipenuhi agar produk yang dihasilkan dapat distempel halal.

Sebanyak 65 perusahaan besar yang berasal dari 15 negara mengutus 102 pegawainya untuk mengikuti Pelatihan Internasional Sistem Jaminan Halal di Nusa Dua, Bali, pada 18—20 April 2018. Mereka berasal dari Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura, China, India, Inggris, Spanyol, Prancis, Australia, Amerika Serikat, Argentina, dan Indonesia.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Indonesia Halal Training dan Education Center menggandeng Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tersebut merupakan yang ketiga kali dalam 3 tahun terakhir. Setiap tahun, jumlah peserta semakin bertambah, dengan jangkauan negara yang juga semakin luas.

Kepala Indonesia Halal Training and Education Center (Ihatec) Nur Wahid mengatakan, sekitar 20% peserta pelatihan berasal dari perusahaan yang bahkan belum pernah menajalkan barang ke Indonesia.

“Peserta pelatihan banyak juga dari produsen kosmetik yang mulai mencari tahu jaminan halal karena kebutuh-

an masyarakat yang meningkat,” ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (19/4).

Selain mengikuti pelatihan di Indonesia, perwakilan dari Jepang juga mengajak bekerja sama untuk menyelenggarakan pelatihan serupa di negara asalnya. Langkah konkret yang telah diambil adalah Ihatec telah menandatangani kerja sama dengan Yano Researct Institute yang akan menjadi partner penyelenggaraan pelatihan di negara sakura.

## KOMPRESIF

Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengatakan, selama 3 hari pelatihan, setiap peserta mendapatkan informasi lengkap mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan tempat mereka bekerja agar dapat menjalankan sistem jaminan halal.

Jaminan halal, lanjut Lukmanul, bersifat komprehensif meliputi seluruh proses produksi produksi hingga perjalanannya menuju ke tangan konsumen. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus benar-benar memahami sistem jaminan halal agar produk yang ditawarkan memenuhi standar.

Beberapa negara memang telah memiliki standar jaminan halal, akan tetapi standar tersebut tidak seragam, dan belum tentu sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.

Menurut Ihatec, setidaknya ada 11 kriteria yang harus dipenuhi perusahaan yang akan menajalkan barang di Indonesia.

Kriteria tersebut meliputi perusahaan memiliki kebijakan halal, tim manajemen pengelola kebijakan halal, melakukan pelatihan dan pendidikan mengenai konsep ha-

lal, memiliki kriteria tentang bahan halal dan nonhalal, mengetahui kriteria produk yang bisa dan tidak bisa disertifikasi, kemudian memiliki fasilitas yang bebas dari hal yang mencemari kehalalan.

Selanjutnya, memiliki kriteria prosedur tertulis untuk aktivitas produksi dalam keadaan kritis, memiliki sistem ketertelusuran, prosedur menangani produk yang tidak halal, memiliki tim audit internal untuk melakukan evaluasi evaluasi minimal enam bulan sekali, dan memiliki tujuan manajemen.

“Kami juga memberikan pemahaman bahan misalnya kalau menggunakan lemak tertentu apa saja syarat dan dokumen yang harus dimiliki, atau menggunakan MSG apa, atau fermentasi yang bagaimana,” jelas Nur Wahid.

Dia mengakui, selama ini proses sertifikasi jaminan halal di Indonesia memang bersifat sukarela. Tetapi sejak 2014, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki jaminan halal. Undang-Undang ini akan berlaku pada 2019.

Adapun saat ini, kebutuhan jaminan halal tertinggi ada di produk pangan. Walaupun demikian, dia tidak menampik kebutuhan jaminan halal pada produk obat-obatan dan kosmetik akan sangat diperlukan nantinya. Apalagi, UU JPH akan segera direalisasikan pada 2019.

“Kelak, jika undang-undang [jaminan halal] ini berlaku, maka produk pilihannya hanya ada dua yakni halal dan nonhalal, kalau sekarang kan masih ada 3 yaitu halal, nonhalal, dan tidak jelas,” katanya. (R23)

## JAYA ANCOL

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK

Sehubungan dengan Iklan Pengumuman dan Ralat Iklan Pengumuman terkait dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (“Perseroan”) yang diumumkan pada surat kabar harian *Bisnis Indonesia* pada tanggal 22 Maret 2018 dan 6 April 2018, bersama ini Perseroan melakukan pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 14 Mei 2018  
Jam : 09.30 WIB - Selesai  
Tempat : MPH Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara

#### Mata Acara Rapat:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.  
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 wajib diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS. Dalam mata acara Rapat ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
- Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.  
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 jo Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Jo 71 UUPT usul penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan para pemegang saham Perseroan.
- Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
Penjelasan: Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 17 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Iukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Patungan.
- Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2018 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2017.  
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 jo Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 jo Pasal 113 UUPT besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Propinsi DKI Jakarta, Perseroan juga mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 242 Tahun 2015.
- Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.  
Penjelasan: Sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT dan Pasal 36A POJK Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penetapan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan akuntan publik independen tersebut dilakukan melalui RUPS.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016.  
Penjelasan: Sesuai Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

#### CATATAN:

- Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 5 dan Pasal 13 POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan/atau diwakili dalam Rapat adalah: para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 19 April 2018.
- Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor BAE Perseroan dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE yakni PT Admitra Jasa Korpora dengan alamat Plaza Properti Lantai 2, Komplek Pertokoan Pulomas VIII/1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB. ...
- Bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh dari Kantor Pusat Perseroan, Gedung E Convention Jl. Lodon Timur No 7, Jakarta Utara, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini, kecuali untuk bahan mata acara Rapat ke-5 akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan di samping Surat Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
- Untuk mempermudah pengantaran dan terbnyanya Rapat, pemegang saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 April 2018  
Direksi  
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Note: Iklan Pemanggilan Rapat ini atau fotokopinya berlaku pula sebagai tanda masuk Pintu Gerbang Utama Ancol Taman Impian mulai pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB, berlaku 1 (satu) orang dengan 1 (satu) kendaraan.